



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Nomor : S – 711 /K/JF/2019
Lampiran : Satu berkas
Hal : Evaluasi dan Validasi Usulan Kebutuhan
Jabatan Fungsional Auditor

Jakarta, 8 Agustus 2019

Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

di tempat

Menindaklanjuti Surat Menteri PANRB Nomor B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Menteri PANRB Nomor B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal **Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional** mewajibkan Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usulan kebutuhan jabatan fungsional kepada Instansi Pembina jabatan fungsional untuk mendapatkan rekomendasi sebelum menyampaikan usulan kepada Menteri PANRB.
2. Surat Menteri PANRB Nomor B/752/SM.01.00/2019 tanggal 5 Juli 2019 perihal pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui **Penyesuaian atau Inpassing** meminta Instansi Pembina jabatan fungsional melakukan evaluasi dan validasi terhadap usulan kebutuhan setiap jenjang jabatan fungsional sebelum memberikan rekomendasi kepada Menteri PANRB.
3. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, kami harapkan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) kepada Kepala BPKP selaku Instansi Pembina JFA melalui Kepala Pusat Pembinaan JFA dengan tata cara perhitungan dan format usulan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Pelaksana Tugas Kepala BPKP,

Iswan Elmi

NIP. 19600127 198102 1 001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara

Lampiran I
Surat Nomor : S- 711 /K/JF/2019
Tanggal : 8 Agustus 2019

TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN JFA

A. Dasar Perhitungan

Perhitungan kebutuhan JFA mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

Lingkungan pengawasan pada saat ini telah mengalami perubahan baik dari sisi penggunaan teknologi maupun peran APIP. Penggunaan teknologi dalam melaksanakan pengawasan akan dapat mengurangi jumlah anggota tim dalam struktur tim dalam penugasan sehingga mempengaruhi perhitungan kebutuhan JFA.

B. Tata Cara Perhitungan

1. Perhitungan kebutuhan JFA sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 adalah sebagai berikut:

a. Perhitungan kebutuhan JFA berdasarkan perkiraan beban kerja masing-masing unit APIP.

Perhitungan beban kerja sebagai berikut:

(jumlah auditan x jenis kegiatan audit x rata-rata hari penugasan audit)
+ HP (hari penugasan) kegiatan pengawasan lainnya termasuk
pengembangan profesi (30%)

b. Jumlah auditan dihitung berdasarkan rata-rata PKPT dua tahun terakhir.

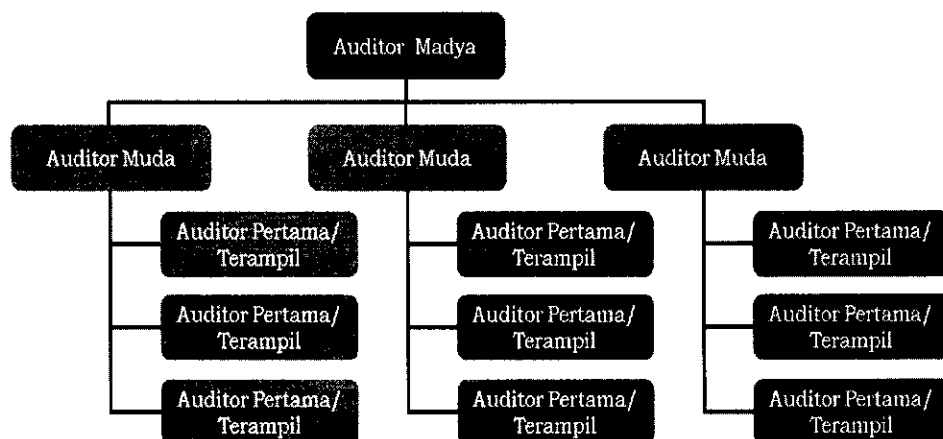
c. Jenis kegiatan audit meliputi audit kinerja, audit keuangan, audit tujuan tertentu, reviu, evaluasi, dan pemantauan.

d. Dalam perhitungan kebutuhan JFA, Auditor Utama berperan sebagai Pengendali Mutu, Auditor Madya sebagai Pengendali Teknis (PT),

Auditor Muda sebagai Ketua Tim (KT), dan Auditor Pertama/Terampil sebagai Anggota Tim (AT).

- e. Komposisi tim audit terdiri dari satu Pengendali Teknis (Auditor Madya), satu Ketua Tim (Auditor Muda), dan tiga Anggota Tim (Auditor Pertama/ Auditor Terampil).

Perhitungan kebutuhan JFA didasarkan atas konsep Gugus Tugas. Seorang Auditor Utama membawahkan maksimal tiga Gugus Tugas. Satu Gugus Tugas terdiri dari 13 Auditor dengan susunan sebagai berikut:



Satu pengendali teknis membawahkan tugas tiga tim sehingga hari pengawasan setiap penugasan adalah $\frac{1}{3}$ dari hari pengawasan tim.

- f. Rata-rata hari penugasan audit adalah sebagai berikut:
- 1) Unit APIP yang menerapkan 5 hari kerja dalam satu minggu.
Rata-rata hari penugasan audit adalah 15 hari kerja. Komposisi tim audit terdiri dari 1 Auditor Madya, 1 Auditor Muda, dan 3 Auditor Pertama/Auditor Terampil. Hari penugasan Auditor Madya 5 hari kerja ($\frac{1}{3}$ hari penugasan Auditor Muda), Auditor Muda dan Auditor Pertama/Auditor Terampil masing-masing 15 hari kerja sehingga total hari penugasan satu tim sebanyak 65 HP.
 - 2) Unit APIP yang menerapkan 6 hari kerja dalam satu minggu.
Rata-rata hari penugasan audit adalah 18 hari kerja. Komposisi tim audit terdiri dari 1 Auditor Madya, 1 Auditor Muda, dan 3 Auditor Pertama/Auditor Terampil. Hari penugasan Auditor Madya 6 hari kerja ($\frac{1}{3}$ hari penugasan Auditor Muda), Auditor Muda dan Auditor Pertama/Auditor Terampil masing-masing 18 hari kerja sehingga total hari penugasan satu tim sebanyak 78 HP.

- g. HP untuk kegiatan pengawasan lainnya besarnya ditetapkan 30% dari jumlah untuk kegiatan audit.
- h. Hasil perhitungan beban kerja sebagaimana huruf a, selanjutnya dibandingkan dengan tabel perhitungan kebutuhan JFA dalam bentuk Gugus Tugas (GT) dibawah ini.

Tabel 1
Perhitungan Kebutuhan JFA Unit APIP
Yang Menerapkan 5 Hari Kerja Dalam Satu Minggu

KELOMPOK	BEBAN KERJA UNIT KERJA (HP)	KEBUTUHAN JFA	
A 1	Di atas 29.900	12 GT	+ 4 orang Auditor Utama
A 2	Di atas 27.300 s.d. 29.900	11 GT	
A 3	Di atas 24.700 s.d. 27.300	10 GT	
B 1	Di atas 22.100 s.d. 24.700	9 GT	+ 3 orang Auditor Utama
B 2	Di atas 19.500 s.d. 22.100	8 GT	
B 3	Di atas 16.900 s.d. 19.500	7 GT	
C 1	Di atas 14.300 s.d. 16.900	6 GT	+ 2 orang Auditor Utama
C 2	Di atas 11.700 s.d. 14.300	5 GT	
C 3	Di atas 9.100 s.d. 11.700	4 GT	
D 1	Di atas 6.500 s.d. 9.100	3 GT	+ 1 orang Auditor Utama
D 2	Di atas 3.900 s.d. 6.500	2 GT	
D 3	Sampai dengan 3.900	1 GT	

Tabel 2
Perhitungan Kebutuhan JFA Unit APIP
Yang Menerapkan 6 Hari Kerja Dalam Satu Minggu

KELOMPOK	BEBAN KERJA UNIT KERJA (HP)	KEBUTUHAN JFA	
A 1	Di atas 37.375	12 GT	+ 4 orang Auditor Utama
A 2	Di atas 34.125 s.d. 37.375	11 GT	
A 3	Di atas 30.875 s.d. 34.125	10 GT	
B 1	Di atas 27.625 s.d. 30.875	9 GT	+ 3 orang Auditor Utama
B 2	Di atas 24.375 s.d. 27.625	8 GT	
B 3	Di atas 21.125 s.d. 24.375	7 GT	
C 1	Di atas 17.875 s.d. 21.125	6 GT	+ 2 orang Auditor Utama
C 2	Di atas 14.625 s.d. 17.875	5 GT	
C 3	Di atas 11.375 s.d. 14.625	4 GT	
D 1	Di atas 8.125 s.d. 11.375	3 GT	+ 1 orang Auditor Utama
D 2	Di atas 4.875 s.d. 8.125	2 GT	
D 3	Sampai dengan 4.875	1 GT	

i. Contoh Perhitungan Jumlah Kebutuhan JFA

Berikut adalah contoh perhitungan kebutuhan JFA untuk Inspektorat Kabupaten XX Tahun 20XX yang menerapkan 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Kegiatan pengawasan dalam PKPT beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

- 1) Kegiatan yang dilaksanakan terhadap sekretariat, badan, dinas dan kantor adalah audit kinerja, evaluasi lakip, reviu RKA (3 jenis kegiatan).
- 2) RSUD, kecamatan dan desa dilaksanakan audit kinerja.
- 3) Audit khusus.
- 4) Audit pengaduan masyarakat.
- 5) Kegiatan monitoring tindak lanjut.

NO	URAIAN	JUMLAH UNIT	JENIS KEGIATAN AUDIT	JUMLAH KEGIATAN AUDIT
A	SKPD/Auditan/Kegiatan			
1	Sekretariat Daerah	1	3	3
2	Sekretariat DPRD	1	3	3
3	Badan	5	3	15
4	Dinas	10	3	30
5	Kantor	5	3	15
6	RSUD	1	1	1
7	Kecamatan	10	1	10
8	Desa	20	1	20
9	Audit Khusus	15	1	15
10	Pengaduan Masyarakat	15	1	15
11	Monitoring Tindak Lanjut	20	1	20
B	Jumlah kegiatan pengawasan			147
C	Rata-rata HP per tim			65 HP
D	Jumlah beban kerja (BxC)			9.555 HP
E	Jumlah beban kerja untuk kegiatan pengawasan lainnya (30% x D)			2.867 HP
F	Total beban kerja (D+E)			12.422 HP

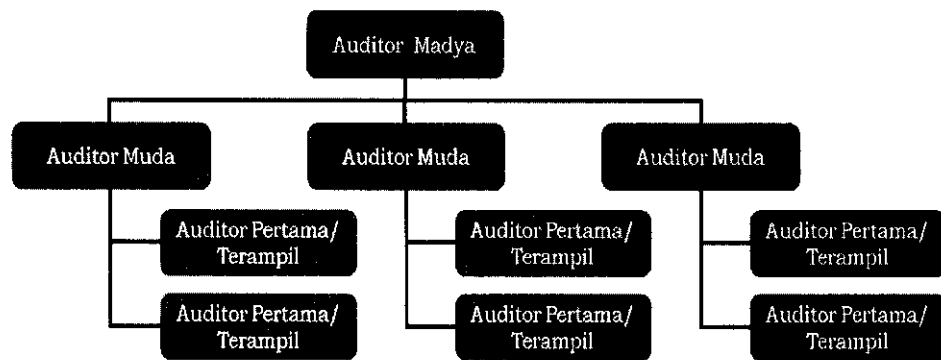
Jumlah beban kerja Inspektorat Kabupaten XX sesuai tabel di atas adalah sebesar 12.422 HP. Sesuai dengan tabel 1, beban kerja sejumlah tersebut termasuk dalam Kelompok C2 sehingga memerlukan 5 Gugus Tugas ditambah 2 Auditor Utama, dengan rincian jumlah auditor sebagai berikut:

NO.	JABATAN	JUMLAH AUDITOR
1	Auditor Utama	2
2	Auditor Madya (5 GT x 1 Auditor)	5
3	Auditor Muda (5 GT x 3 Auditor)	15
4	Auditor Pertama/Terampil (5 GT x 9 Auditor)	45
Jumlah		67

2. Alternatif Tata Cara Perhitungan

Perubahan lingkungan pengawasan pada saat ini mempengaruhi kegiatan pengawasan baik dari sisi penggunaan teknologi maupun peran APIP. Penggunaan teknologi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dimungkinkan dapat mengurangi jumlah anggota tim dalam struktur tim dalam penugasan. Oleh karena itu perhitungan kebutuhan JFA dapat menggunakan alternatif sebagai berikut:

- a. Perhitungan kebutuhan JFA tetap berdasarkan perkiraan beban kerja masing-masing unit APIP dengan rumus perhitungan sebagaimana tercantum dalam huruf B, angka 1, huruf a di atas.
- b. Komposisi tim Audit terdiri dari satu Pengendali Teknis (Auditor Madya), satu Ketua Tim (Auditor Muda), dan dua Anggota Tim (Auditor Pertama/ Auditor Terampil).
- c. Perhitungan kebutuhan JFA didasarkan atas konsep Gugus Tugas. Seorang Auditor Utama membawahkan maksimal tiga Gugus Tugas. Satu Gugus Tugas terdiri dari 10 Auditor dengan susunan sebagai berikut:



- d. Rata-rata hari penugasan audit adalah sebagai berikut:
- 1) Unit APIP yang menerapkan 5 hari kerja dalam satu minggu.
Rata-rata hari penugasan audit adalah 15 hari kerja. Komposisi tim audit terdiri dari 1 Auditor Madya, 1 Auditor Muda, dan 2 Auditor Pertama/Auditor Terampil. Hari penugasan Auditor Madya 5 hari kerja ($\frac{1}{3}$ hari penugasan Auditor Muda), Auditor Muda dan Auditor Pertama/Auditor Terampil masing-masing 15 hari kerja sehingga total hari penugasan satu tim sebanyak 50 HP.
 - 2) Unit APIP yang menerapkan 6 hari kerja dalam satu minggu.
Rata-rata hari penugasan audit adalah 18 hari kerja. Komposisi tim audit terdiri dari 1 Auditor Madya, 1 Auditor Muda, dan 2 Auditor Pertama/Auditor Terampil. Hari penugasan Auditor Madya 6 hari kerja ($\frac{1}{3}$ hari penugasan Auditor Muda), Auditor Muda dan Auditor Pertama/Auditor Terampil masing-masing 18 hari kerja sehingga total hari penugasan satu tim sebanyak 60 HP.
- e. HP untuk kegiatan pengawasan lainnya besarnya ditetapkan 30% dari jumlah untuk kegiatan audit.
- f. Hasil perhitungan beban kerja sebagaimana huruf a di atas, selanjutnya dibandingkan dengan tabel perhitungan kebutuhan JFA dalam bentuk Gugus Tugas (GT) di bawah ini.

Tabel 3
Perhitungan Kebutuhan JFA Unit APIP
Yang Menerapkan 5 Hari Kerja Dalam Satu Minggu

KELOMPOK	BEBAN KERJA UNIT KERJA (HP)	KEBUTUHAN JFA	
A1	Di atas 23.000	12 GT	+ 4 Auditor Utama
A2	Di atas 21.000 s.d. 23.000	11 GT	
A3	Di atas 19.000 s.d. 21.000	10 GT	
B1	Di atas 17.000 s.d. 19.000	9 GT	+ 3 Auditor Utama
B2	Di atas 15.000 s.d. 17.000	8 GT	
B3	Di atas 13.000 s.d. 15.000	7 GT	
C1	Di atas 11.000 s.d. 13.000	6 GT	+ 2 Auditor Utama
C2	Di atas 9.000 s.d. 11.000	5 GT	
C3	Di atas 7.000 s.d. 9.000	4 GT	
D1	Di atas 5.000 s.d. 7.000	3 GT	+ 1 Auditor Utama
D2	Di atas 3.000 s.d. 5.000	2 GT	
D3	Sampai dengan 3.000	1 GT	

Tabel 4
Perhitungan Kebutuhan JFA Unit APIP
Yang Menerapkan 6 Hari Kerja Dalam Satu Minggu

KELOMPOK	BEBAN KERJA UNIT KERJA (HP)	KEBUTUHAN JFA	
A1	Di atas 28.750	12 GT	+ 4 Auditor Utama
A2	Di atas 26.250 s.d. 28.750	11 GT	
A3	Di atas 23.750 s.d. 26.250	10 GT	
B1	Di atas 21.250 s.d. 23.750	9 GT	+ 3 Auditor Utama
B2	Di atas 18.750 s.d. 21.250	8 GT	
B3	Di atas 16.250 s.d. 18.750	7 GT	
C1	Di atas 13.750 s.d. 16.250	6 GT	+ 2 Auditor Utama
C2	Di atas 11.250 s.d. 13.750	5 GT	
C3	Di atas 8.750 s.d. 11.250	4 GT	
D1	Di atas 6.250 s.d. 8.750	3 GT	+ 1 Auditor Utama
D2	Di atas 3.750 s.d. 6.250	2 GT	
D3	Sampai dengan 3.750	GT	

g. Contoh Perhitungan Jumlah Kebutuhan JFA

Berikut adalah contoh perhitungan kebutuhan JFA untuk Inspektorat Kabupaten YY Tahun 20YY yang menerapkan 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Kegiatan pengawasan dalam PKPT beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

- 1) Kegiatan yang dilaksanakan terhadap sekretariat, badan, dinas dan kantor adalah audit kinerja, evaluasi lakip, reviu RKA (3 jenis kegiatan).
- 2) RSUD, kecamatan dan desa dilaksanakan audit kinerja.
- 3) Audit khusus.
- 4) Audit pengaduan masyarakat.
- 5) Kegiatan monitoring tindak lanjut.

NO	URAIAN	JUMLAH UNIT	JENIS KEGIATAN AUDIT	JUMLAH KEGIATAN AUDIT
A	SKPD/Auditan/Kegiatan			
1	Sekretariat Daerah	1	3	3
2	Sekretariat DPRD	1	3	3
3	Badan	5	3	15
4	Dinas	10	3	30
5	Kantor	5	3	15
6	RSUD	1	1	1
7	Kecamatan	10	1	10
8	Desa	20	1	20
9	Audit Khusus	15	1	15
10	Pengaduan Masyarakat	15	1	15
11	Monitoring Tindak Lanjut	20	1	20
B	Jumlah kegiatan pengawasan			147
C	Rata-rata HP per tim			50 HP
D	Jumlah beban kerja (BxC)			7.350 HP
E	Jumlah beban kerja untuk kegiatan pengawasan lainnya (30% x D)			2.205 HP
F	Total beban kerja (D+E)			9.555 HP

Jumlah beban kerja Inspektorat Kabupaten YY sesuai tabel di atas adalah 9.555 HP. Sesuai dengan tabel 3, beban kerja sejumlah tersebut termasuk dalam Kelompok C2 sehingga memerlukan 5

Gugus Tugas ditambah 2 Auditor Utama, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JABATAN	JUMLAH AUDITOR
1	Auditor Utama	2
2	Auditor Madya (5 GT x 1 Auditor)	5
3	Auditor Muda (5 GT x 3 Auditor)	15
4	Auditor Pertama/Terampil (5 GT x 6 Auditor)	30
Jumlah		52

Masing-masing APIP dapat memilih menggunakan tata cara perhitungan sebagaimana diuraikan pada butir 1 atau 2 di atas.

C. Hasil Perhitungan

Hasil perhitungan kebutuhan JFA contoh pada butir 1 dimasukkan dalam format sebagai berikut:

INSPEKTORAT PERHITUNGAN KEBUTUHAN JFA TAHUN 2019

No	Jenjang Jabatan/Peran	Perhitungan ABK		Jumlah Saat Ini		Kekurangan/Kelebihan		Ket
1	Auditor Ahli Utama/PM		2		0		-2	
2	Auditor Ahli Madya/PT		5		5		0	
3	Auditor Ahli Muda/KT		15		10		-5	
4	Anggota Tim							
	• Auditor Ahli Pertama	15		3		-12		
	• Auditor Penyelia	10		10		0		
	• Auditor Pelaksana Lanjutan	10		2		-8		
	• Auditor Pelaksana	10		4		-6		
	Jumlah Anggota Tim		45		19		-26	
	JUMLAH		67		34		-33	

Komposisi jenjang jabatan pada peran anggota tim disesuaikan dengan kebijakan rekrutmen dan pembinaan auditor di masing-masing instansi.

....., 20.....

Pejabat Pembina Kepegawaian
atau Pejabat Berwenang minimal
setingkat Eselon II,

(..... nama jelas)
NIP

D. Penyampaian Hasil Perhitungan

Hasil perhitungan kebutuhan JFA disampaikan kepada Kepala BPKP untuk dilakukan evaluasi dan validasi sebagai dasar pemberian rekomendasi dengan format surat usulan sebagaimana Lampiran II disertai dengan dokumen sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan kebutuhan pada butir C di atas berikut kertas kerja perhitungan.
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dua tahun terakhir.

Pelaksana Tugas Kepala BPKP,



Iswan Elmi
NIP. 19600127 198102 1 001

Lampiran II
Surat Nomor : S- 711 /K/JF/2019
Tanggal : 8 Agustus 2019

Contoh Format Surat Usulan Kebutuhan JFA

.....[Kop Surat Instansi Pengusul].....

Nomor : 2019
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pengusulan Kebutuhan Jabatan
Fungsional Auditor

Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan
melalui Kepala Pusat Pembinaan JFA
di J a k a r t a

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/528/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 hal Mekanisme Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional dan Surat Kepala BPKP Nomor S-711/K/JF/2019 tanggal 8 Agustus 2019 hal Evaluasi dan Validasi Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor, kami telah menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat.....

Sehubungan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor berikut dokumen pendukungnya (terlampir) untuk mendapatkan rekomendasi sebelum kami usulkan penetapannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

..... 20.....
Pejabat Pembina Kepegawaian

(..... nama jelas)
NIP

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi..... di
3.

Pelaksana Tugas Kepala BPKP,

Iswan Elmi
NIP. 19600127 198102 1 001